

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan permukiman kumuh merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas permukiman masyarakat. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang bertujuan untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah perkotaan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar sehingga dapat mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Provinsi yang menjadi “platform” atau basis penangan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber daya pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu daerah yang menjadi Kawasan kumuh adalah kelurahan lapulu kecamatan abeli, Kota Kendari Sulawesi Tenggara. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi Masyarakat.

Kelurahan lapulu merupakan bagian wilayah administrasi dari kecamatan abeli. Munculnya Program KOTAKU di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli pada tahun 2022 menjadi pendukung dalam terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Pemerintah dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan mampu implementasi dengan mengikutsertakan Masyarakat dalam menjalankan program tersebut, sebagai program yang dapat menanggulangi kemiskinan dan permukiman kumuh di perkotaan khusus nya sekitar teluk Kendari. Permukiman kumuh yang ada di kelurahan lapulu memiliki masalah utama yaitu kualitas bangunan dan kerapatan bangunan yang sangat tinggi serta tidak ada nya proteksi kebakaran

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Provinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber daya pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu daerah yang menjadi kawasan kumuh adalah Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Kelurahan Lapulu merupakan bagian Wilayah Administrasi dari Kecamatan Abeli. Munculnya Program KOTAKU di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli pada tahun 2022 menjadi pendukung dalam terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Pemerintah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menjalankan program tersebut, sebagai program yang dapat menanggulangi kemiskinan dan permukiman kumuh di perkotaan, khususnya sekitar Teluk Kendari. Permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Lapulu memiliki masalah utama, yaitu kualitas bangunan dan kerapatan bangunan yang sangat tinggi serta tidak adanya proteksi kebakaran

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari?
2. Bagaimana kepuasan masyarakat yang bermukim di Kelurahan Lapulu terhadap implementasi Program KOTAKU?
3. Bagaimana strategi peningkatan kualitas Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lapulu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis karakteristik permukiman kumuh Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari

2. Menganalisis tingkat kepuasan masyarakat yang bermukim di Kelurahan Lapulu terhadap implementasi Program KOTAKU
3. Merumuskan strategi Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lapulu

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait tujuan, manfaat, dan fungsi Program KOTAKU dalam menangani permukiman kumuh.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam meningkatkan peran pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh.
3. Bagi pendidikan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, dalam melakukan evaluasi program penanganan permukiman kumuh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ada dua ruang, yaitu lokasi penelitian yang membahas mengenai batasan wilayah penelitian secara keruangan, sedangkan lingkup substansi penelitian berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari enam bab yang memuat latar belakang hingga kesimpulan, disusun secara berurutan dan terstruktur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, output penelitian, alur pikir, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dibahas tentang tinjauan pustaka atau referensi-referensi yang digunakan dalam menyusun laporan yang berisi teori-teori terkait penelitian dan tinjauan studi banding serta studi penelitian terdahulu terkait kasus sejenis serta merumuskan kerangka konsep dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk mencapai *output*. Adapun muatan dalam bab ini adalah berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan merumuskan kebutuhan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi gambaran umum, analisis, pembahasan dan pemaknaan hasil analisis, serta kesimpulan-kesimpulan berupa makna dari hasil yang diperoleh dari penelitian serta fokus untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi bagian kesimpulan yang akan menjawab setiap pertanyaan penelitian, sedangkan bagian saran berupa arahan rekomendasi terhadap penelitian dan bagi peneliti selanjutnya.

1.7 Evaluasi

Istilah penilaian atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *evaluation*. Ada beberapa istilah yang sering digunakan secara tumpang tindih untuk menjelaskan pengertian evaluasi, yaitu *measurement* atau pengukuran, *assessment* atau penilaian/penaksiran, dan *test*. Ketiga istilah tersebut kadang-kadang digunakan secara bergantian dan dianggap memiliki pengertian yang sama, padahal ketiganya memiliki perbedaan (Ismail, 2020).

Evaluasi merupakan langkah terencana untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan menilai efektivitas, kualitas, atau nilai dari suatu program, kegiatan, atau produk. Tujuan utamanya adalah memberikan umpan balik yang bermanfaat dan mendukung pengambilan keputusan. Tujuan lain dari evaluasi yaitu mampu meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data angka, maupun pendekatan kualitatif yang mengandalkan data deskriptif, dan dapat dilaksanakan pada berbagai fase, yaitu sebelum, selama, atau setelah suatu kegiatan atau program dilaksanakan.

1.7.1 Pengertian Evaluasi

Menurut Warman et al. (2023), evaluasi adalah upaya penilaian yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai nilai dan manfaat dari suatu program atau kebijakan. Dunn dalam Musthofa (2011) menyatakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan program. Selain itu, evaluasi program juga dapat diartikan sebagai pengumpulan informasi secara sistematis mengenai karakteristik dan dampak dari program untuk membuat keputusan mengenai program, keefektifan pelaksanaan program, dan keberlanjutan program (Patton, 2001 dalam Musthofa, 2011). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya evaluasi program dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program.

1.7.2 Jenis Evaluasi Program

Secara umum pelaksanaan evaluasi dibagi atas tiga jenis yaitu:

1. Evaluasi pada tahap perencanaan (*Ex Ante*). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*On-Going*). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*Ex-Post*). Pada tahap pasca pelaksanaan, evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program.

1.7.3 Pendekatan Evaluasi

Menurut Warman et al. (2023), pendekatan evaluasi merupakan cara yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan. Dalam evaluasi kebijakan terdapat beberapa pendekatan yang dapat dibedakan berdasarkan karakteristik, yaitu:

1. Evaluasi semu (*Pseudo Evaluation*) adalah suatu pendekatan evaluasi yang bersandarkan pada informasi/data yang bersifat self-evident (dapat terbukti sendiri) dan tidak kontroversial, juga tidak dikaitkan secara spesifik dengan 7 sistem nilai seseorang/sekelompok orang, dan tanpa berusaha mengetahui manfaat nilai tersebut terhadap suatu kelompok atau individu.
2. Evaluasi formal (*Formal Evaluation*) adalah suatu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi yang valid dan reliable tentang hasil-hasil dari suatu kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan atau program.
3. *Decision Theoretic Evaluation* (DTE) adalah suatu pendekatan evaluasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil kebijakan/program yang secara eksplisit dinilai oleh beberapa macam pelaku kebijakan.

Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi dalam tingkatan program, dengan menggunakan pendekatan evaluasi formal dan dilakukan setelah program selesai dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Penggunaan pendekatan evaluasi formal dilakukan dengan asumsi penilaian evaluasi didasarkan bahwa tujuan dan pelaksanaan diumumkan secara formal sebagai ukuran yang tepat untuk menilai program.

1.7.4 Manfaat Evaluasi

Seperti disebutkan oleh Sudjana 2006 dalam Widyoko (2010), tujuan khusus evaluasi program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk:

1. Memberikan masukan bagi perencanaan program.
2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program.
3. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program.

4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program.
5. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervise dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program.
6. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

Evaluasi program berfungsi membantu mengontrol pelaksanaan program agar dapat diketahui tindak lanjut apa yang harus dilakukan dari pelaksanaan program. Evaluasi juga menjawab pertanyaan sejauh mana program berhasil mencapai tujuan sehingga dapat membuat keputusan apakah program dihentikan, dilanjutkan, atau diperbaiki (Fatjriani & Arifin 2021).

1.7.5 Kriteria evaluasi

Kriteria evaluasi terbagi atas lima aspek menurut Dunn (1994) dalam Putri, K. (2025) yakni, sebagai berikut:

1. Efektivitas

Penilaian terkait efektivitas dalam suatu program utamanya dari segi teknis biasanya dilakukan dengan mengetahui bagaimana suatu program dapat mencapai hasil yang diharapkan dan untuk mengetahui apakah sudah terlaksana secara merata.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam suatu program dapat dilihat dari pertimbangan pelaksanaan program menghasilkan suatu jenis usaha yang baik atau perlu dilakukan revisi terhadap program tersebut. Penilaian kriteria efisiensi dengan menilai program apakah berjalan dengan cara paling optimal, dan menghasilkan output maksimal, dengan pengorbanan yang minimal.

3. Kecukupan

Dalam kriteria kecukupan, evaluasi memiliki tujuan untuk bisa mengetahui dan menilai sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang mungkin menimbulkan masalah dalam sebuah program. Kriteria kecukupan mengedepankan dampak atau manfaat yang besar dari kegiatan yang berjalan.

4. Responsifitas

Dalam kriteria reponsifitas, penilaian kriteria responsifitas ini selalu mengetahui dan melihat apakah suatu program dapat memuaskan kebutuhan suatu kelompok yang dilakukan dengan melalui survey disetiap kelompok tersebut.

5. Ketepatan

Ketepatan dalam kegiatan ini melihat hasil sesuai dengan substansi yang ada juga melihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang bernilai atau bermanfaat.

Tabel 1 Pelaksanaan evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi	
1. Tahap Perencanaan (<i>ex ante evaluation</i>)	
a.	Dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan
b.	Untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
2. Tahap Pelaksanaan (<i>ongoing evaluation</i>)	
a.	Dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan
b.	Untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya
3. Tahap Pasca Pelaksanaan (<i>ex-post evaluation</i>)	
a.	Dilakukan setelah pelaksanaan rencana berakhir
b.	Untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil) program mampu mengatasi permasalahan yang ingin dipecahkan
c.	Untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Sumber: William Dunn (1994)

Dari ketiga jenis pelaksanaan evaluasi diatas, evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi yang dilakukan pada saat program penanganan permukiman kumuh telah selesai dilakukan (*Ex-post Evaluation*). Dimana penelitian ini nantinya akan menilai tingkat keberhasilan dari program penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Patton dan Sawicki (1991) mengklasifikasikan metode pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi 6 (enam) yaitu :

1. *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu kebijakan atau program diimplementasikan kebijakan atau program diimplementasikan.
2. *With and without comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan menggunakan perbandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan yang mendapat kebijakan atau program, yang telah di modifikasi dengan memasukan perbandingan kriteria-kriteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa (TKP) dengan program terhadap suatu TKP tanpa program.
3. *Actual versus planed performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (planned).
4. *Experimental (controlled) models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol/dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
5. *Quasi experimental models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
6. *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana.

Metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Before and after comparisons* dimana dalam penelitian ini dilakukan analisis perbandingan antara kondisi sebelum dilakukan program dengan setelah dilaksanakan program untuk melihat perubahan pada kondisi fisik dan sosial ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang sudah dilaksanakan.

1.8 Permukiman

Permukiman berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan Perumahan sebagai suatu bagian dari lingkungan tempat tinggal yang terdiri dari beberapa unit rumah yang dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur seperti jalan, air, listrik dan juga memiliki fasilitas

umum seperti taman, tempat ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, serta mampu mendukung berbagai kegiatan fungsi lainnya. Kawasan permukiman ini dapat ditemukan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Kondisi dari suatu permukiman sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup di permukiman tersebut (Farizki & Anurog, 2017).

Defenisi Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berdasarkan Permen PUPR RI No. 12 Tahun 2020 adalah satu kesatuan sistem yang mencakup berbagai elemen, seperti penyelenggaraan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pembinaan dan penyelenggaraan perumahan, pemeliharaan dan perbaikan, pendanaan dan sistem pembiayaan, penyediaan tanah, serta peran masyarakat.

Peningkatan kualitas permukiman berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 dapat dinilai dari beberapa kriteria, sebagai berikut.

- a. Keadaan permukiman yang padat, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan permukiman, serta fasilitas, infrastruktur, dan utilitasnya.
- b. Kekurangan infrastruktur dan sarana umum yang memadai.
- c. Tidak sesuai dengan rencana tata ruang perumahan, permukiman dan pembangunan rumah yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa penyediaan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib pemerintah dimana pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota (Saleh, 2021).

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup/lingkungan hunian yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Suatu permukiman seharusnya layak huni sehingga dapat memberikan kenyamanan masyarakat yang bermukim di suatu permukiman tersebut (Stevani dkk., 2023). Pemukiman adalah suatu wilayah atau area yang ditempati oleh seseorang atau kelompok manusia. Pemukiman memiliki kaitan yang cukup erat dengan kondisi alam dan sosial kemasyarakatan sekitar. Perumahan dan pemukiman merupakan kesatuan fungsional, sebab pembangunan perumahan

harus berlandaskan suatu pola pemukiman yang menyeluruh, yaitu tidak hanya meliputi pembangunan fisik rumah saja, melainkan juga dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial, terutama di daerah perkotaan yang mempunyai permasalahan majemuk dan multidimensional (Nasution, 2019).

Kriteria permukiman berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 dapat ditinjau dari sebagai berikut.

- a. Struktur bangunan;
- b. Jaringan jalan lingkungan;
- c. Penyediaan sumber air minum;
- d. Saluran drainase lingkungan;
- e. Pengolahan air limbah;
- f. Penanganan dan pengelolaan sampah;
- g. Sistem proteksi kebakaran.

Pola kawasan permukiman menurut Kostof (1983) dalam Lautetu (2019), terdiri dari tiga pola berdasarkan sifat komunitasnya, yaitu:

- a. Pola linear
- b. Pola clustered
- c. Pola kombinasi

Komponen Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan berdasarkan Permen Negara Perumahan Rakyat RI Nomor 34/PERMEN/M/2006 Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan sebagai berikut:

- a. Prasarana permukiman terdiri dari jalan, drainase (primer dan sekunder), air limbah (terpusat dan setempat), persampahan (komposter dan tempat pengolahan sementara), jaringan air minum (distribusi, terminal air dan HU).
- b. Sarana permukiman terdiri dari tempat pendidikan (SD dan SLTP), layanan kesehatan (klinik, posyandu, puskesmas pembantu dan puskesmas), layanan perdagangan (warung pujasera, pasar, tempat pelelangan ikan), fasilitas sosial dan fasilitas umum (rumah ibadah dan balai pertemuan), tempat olahraga (lapangan olahraga), pemakaman, Ruang Terbuka Hijau (taman dan tempat penjemuran ikan) dan terminal (dermaga).

- c. Utilitas umum permukiman terdiri dari jaringan listrik (gardu dan jaringan PLN serta genset), jaringan telepon (jaringan telkom), jaringan gas (jaringan migas), transportasi (angkutan umum), pemadam kebakaran (perlengkapan pemadam kebakaran).

1.9 Permukiman Kumuh

Timbulnya pemukiman kumuh ini karena didorong adanya faktor-faktor yang membuat orang-orang lebih memilih tinggal di permukiman kumuh daripada tinggal di permukiman yang lebih layak untuk mereka. Faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Banyak dari mereka yang tinggal di lingkungan yang kumuh tersebut, karena mereka tidak mampu untuk membeli atau mengontrak rumah yang lebih layak untuk mereka tinggal. Kondisi permukiman kumuh ditandai rumah-rumah yang dibangun dengan bahan seadanya, tidak teratur, tanpa kepemilikan atau ilegal, saluran air tidak mendukung, sampah-sampah bertumpuk dan berserakan, serta penduduk hidup dalam kondisi kesehatan yang buruk (Kartini, 2024)

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang mengalami penurunan kualitas fungsi, yang dimaksud antara lain: kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas bangunan sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. Permukiman kumuh pesisir, terutama nelayan memiliki kekhasan tersendiri akan berbeda dengan perkampungan kumuh lainnya. Permukiman kumuh nelayan dideskripsikan oleh wujud sosial ekonomi yang didominasi oleh masyarakat dengan tingkat kepadatan dan jumlah anggota keluarga yang tinggi, dan tingkat pendapatan yang tergolong rendah, dan dari entitas lingkungan fisik terdapat 39 keterbatasan atau ketidaktersedian infrastruktur sanitasi dan layanan persampahan (Christiawan & Budiarta, 2017).

Permasalahan permukiman cenderung timbul sebagai konsentrasi dari proses pertumbuhan dan perkembangan kota (urbanisasi) yang tidak seimbang antara

kemampuan daya dukung kota terhadap kebutuhan penduduknya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mendorong perkembangan kota yang cepat pula, namun kenyataan ini tidak dibarengi dengan kenaikan tingkat padatnya penduduk secara merata. Masih banyak penduduk kota yang berada pada golongan rendah. Kondisi demikian berdampak pada ketidakmampuan masyarakat kecil untuk membeli lahan di kota untuk tempat tinggal sebagai akibat tingginya harga lahan (Kusnah dkk, 2021).

1.9.1 Klasifikasi Permukiman Kumuh

Dalam buku Kemiskinan di Perkotaan Oleh Dipandang dari karakter fisik dan aspek legalitasnya, kampung kumuh terbagi menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Permukiman Kumuh atau Slum adalah daerah perumahan padat di dalam kota yang mayoritas penduduknya dihadapkan dengan permasalahan fisik dan lingkungan serta permasalahan sosial dan ekonomi. Akan tetapi dalam hal kepemilikan dan hak atas tanah semuanya sah.
2. Permukiman liar atau Squatters adalah tempat bermukim, yang dalam segala hal sama dengan slum, terkecuali dalam hal kepemilikan hak atas tanah.

Fenomena permukiman kumuh yang sebelumnya lebih sering terkait dengan kawasan perkotaan kini mulai merambah ke permukiman di desa. Hal ini merupakan indikasi serius tentang ketidakmerataan pembangunan dan pengelolaan wilayah. Masalah yang timbul adalah adanya ketidaksesuaian antara klasifikasi yang ditetapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Banyak kawasan yang sebelumnya dikategorikan sebagai kumuh berat ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kekumuhan yang sebenarnya, sedangkan beberapa kawasan yang membutuhkan perhatian malah terabaikan (Abas & Swasto, 2024).

1.9.2 Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik permukiman kumuh dapat disebabkan oleh beberapa faktor rumah dan faktor prasarana. Selain itu, kriteria perbaikan permukiman kumuh dapat di lihat dari gejala sosial dan gejala fisik (Diyanah dan Bioresita, (2023). *Slums* (daerah kumuh) ditandai dengan munculnya permukiman di kawasan *urban* tanpa perencanaan sebelumnya. Kemunculan *slums* yang menempati lahan-lahan kawasan *urban* yang dibangun secara mandiri tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan dengan segala keterbatasan yang ada (Wiriantari, 2022).

Menurut Pigawati (2015) identifikasi karakteristik permukiman kumuh dapat dilakukan dengan melihat karakteristik penghuni, karakteristik hunian, karakteristik sarana dan prasarana, karakteristik lingkungan dan tingkat kekumuhan, yaitu sebagai berikut :

1. Karakteristik Penghuni, kondisi sosial dan ekonomi dapat mengungkapkan ciri-ciri penghuninya. Pekerjaan dan tingkat pendapatan merupakan dua aspek ekonomi. Sedangkan faktor sosial meliputi jenis pekerjaan yang dapat mempengaruhi keadaan struktur tempat tinggal dan tingkat pendidikan di lingkungan tersebut.
2. Karakteristik Hunian, karakteristik hunian meliputi:
 - a. Fungsi dan kegiatan yang dilihat dari kegiatan maupun aktifitas yang terjadi didalam hunian di kawasan permukiman.
 - b. Tampilan bangunan yang dilihat dari wujud ataupun bahan bangunan serta luasan bangunan dibandingkan dengan jumlah penghuninya.
 - c. Kepemilikan hunian.
3. Karakteristik Sarana dan Prasarana, dalam mengidentifikasi karakteristik sarana dan prasarana bertujuan untuk mengetahui kondisi, kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana 40 penunjang. Permukiman kumuh tumbuh sebagai akibat dari bertambah buruknya kondisi dan rendah tingkat pelayanannya.
4. Karakteristik Lingkungan, karakteristik lingkungan dilakukan guna mengetahui kondisi lingkungan permukiman, baik kegiatan yang terjadi didalam permukiman itu sendiri ataupun kegiatan yang terdapat di sekitar kawasan yang dapat berdampak kondisi lingkungan permukiman.
5. Tingkat Kekumuhan, tingkat kekumuhan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekumuhan yang terjadi.

Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kondisi dan tingkat kekumuhan pada perumahan dan permukiman kumuh dapat ditinjau dari:

1. Bangunan Gedung, ditinjau dari bangunan gedung mencakup
 - a. Ketidakteraturan bangunan
 - b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang
 - c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
2. Jalan lingkungan, ditinjau dari jalan lingkungan mencakup :

- a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman.
- b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk
- 3. Penyediaan air minum, ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:
 - a. Ketersediaan akses aman air minum
 - b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku
- 4. Drainase lingkungan, ditinjau dari drainase lingkungan mencakup:
 - a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
 - b. Ketidaktersediaan drainase
 - c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
 - d. Tidak terpelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair
 - e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
- 5. Pengelolaan air limbah, ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:
 - a. Sistem air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku
 - b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
- 6. Pengelolaan persampahan, ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:
 - a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
 - b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
 - c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- 7. Proteksi kebakaran, ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup :
 - a. Prasarana proteksi kebakaran
 - b. Sarana proteksi kebakaran

Beberapa studi menunjukkan bahwa ada perbedaan karakteristik kumuh berdasarkan tipologi kawasan permukiman kumuh. Kasusnya yang berlokasi pada permukiman kumuh di tepian sungai, karakteristik kumuh dilihat dari ketersediaan air bersih yang belum merata, pembuangan limbah dan sampah yang tidak memenuhi standar, kualitas bangunan yang rendah, dan kondisi sosial ekonomi penghuni yang didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah sehingga kurang motivasi untuk memiliki tempat tinggal yang layak serta kurang kesadaran terhadap kesehatan lingkungan. Kondisi jalur sirkulasi yang rusak dan ruang terbuka yang tidak tersedia juga memperkuat karakter kumuh di tepian sungai (Awansari & Sukmawati, 2023).

1.9.3 Penanganan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh mencerminkan kondisi penghuninya yang kurang mampu atau miskin, terutama dalam hunian, penggunaan ruang, dan keterbatasan lahan hijau. Ketidaksesuaian dengan persyaratan Ruang Terbuka Hijau mengubah fungsinya menjadi permukiman, menunjukkan kurangnya kemampuan untuk membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan yang mahal (Rangkuti dkk, 2023). Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut (Asmarianti dkk, 2020):

1. Pencegahan, yang terdiri atas:
 - a. Pengawasan dan Pengendalian: kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberdayaan masyarakat: pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
2. Peningkatan kualitas, yang terdiri atas:
 - a. Pemugaran: perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni.
 - b. Peremajaan: mewujudkan permukiman yang lebih baik dengan memprioritaskan keselamatan dan keamanan masyarakat.
 - c. Pemukiman kembali: Relokasi atau pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau termasuk dalam kawasan rawan bencana.

1.10 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

1.10.1 Pengertian Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Permukiman kumuh merupakan masalah yang cukup serius bagi negara berkembang. Pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak program untuk mengatasi masalah permukiman kumuh salah satunya melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang diatur dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program KOTAKU. Program KOTAKU membangun kolaborasi aktor kebijakan dari pemerintah dan non-pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para aktor kebijakan yang terlibat dalam

implementasi Program KOTAKU dan hambatan yang dihadapi para aktor dalam implementasi Program KOTAKU (Purba & Marom, 2021).

Program KOTAKU merupakan program pemerintah yang bertujuan membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud di dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru.

Program KOTAKU adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan upaya strategis direktorat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah (pemkab/pemkot) dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh diperkotaan demi mendukung pencapaian gerakan 100-0-100 (100% tersedia akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% tersedia akses sanitasi layak) sesuai dengan amanah RPJMN tahun 2015- 2021.

Berkenaan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang termaktub di dalam UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menjelaskan bahwa permukiman yang kumuh ialah wilayah permukiman yang tidak layak untuk dihuni yang disebabkan oleh tingkat kepadatan, ketidakberaturan, kualitas, infrastruktur bangunan yang tidak sesuai berdasarkan pada syarat-syarat bangunan yang layak. Sementara itu perumahan kumuh ialah perumahan-perumahan yang memiliki kualitas fungsi yang tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal.

Berdasarkan uraian definisi yang telah dijelaskan di atas tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa karakteristik-karakteristik dari permukiman yang kumuh dan perumahan kumuh yang berdasarkan terhadap aspek-aspek fisik sebagaimana berikut ini:

1. Merupakan satuan entitas permukiman dan perumahan
2. Kondisi infrastruktur bangunan yang tidak melengkapi syarat, memiliki kepadatan tinggi dan tidak teratur

3. Keadaan fisik sarana dan prasarana tidak sesuai dengan syarat sarana dan prasarana. Khusus untuk bidang batasan sarana prasarana dan keciptakaryaan, yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Jalan akses yang ada pada lingkungan tersebut
- b. Drainase yang ada di dalam lingkungan tersebut
- c. Ketersediaan air minum dan air bersih di lingkungan tersebut
- d. Pengelolaan terhadap sampah-sampah yang dihasilkan
- e. Pengelolaan terhadap air limbah
- f. Pengamanan terhadap terjadinya kebakaran dan
- g. Ruang terbuka publik.

Karakteristik-karakteristik fisik tersebut dijadikan sebagai dasar terhadap perumusan indikator dan kriteria terhadap gejala-gejala kumuh di dalam proses pengidentifikasian lokasi permukiman dan perumahan yang kumuh. Sementara itu, karakteristik-karakteristik non fisik yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah kepastian berusaha, kepastian bermukim, perilaku masyarakat, dan juga lain sebagainya.

1.10.2 Tujuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Tujuan dilaksanakannya Program KOTAKU ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 (Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang akan dirumuskan secara tepat pada tahun 2019), menyangkut pembangunan dan pengembangan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, yaitu meningkatkan kualitas permukiman kumuh di perkotaan dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru dan mata pencaharian. Dengan diumumkannya nol permukiman kumuh pada tahun 2019, diikuti dengan arah kebijakan dan strategi utama, serta alokasi anggaran yang memadai sejak tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Salah-satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah penerapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Farjun dkk., 2023)

Program KOTAKU sangat penting artinya dalam upaya dalam mengurangi angka kemiskinan. KOTAKU mempunyai tujuan umum meningkatkan kesejahteraan

dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri, dalam usahanya maka dunia usaha harus termotivasi berkembang di desa-desa, hal ini diharap membawa efek beruntun membawa peluang kerja yang lebih besar didesa, meningkatnya aktivitas usaha ekonomi baik di bidang jasa, industri kecil dan rumah tangga di desa sehingga meningkat pula kesejahteraan di desanya (Nuswantara & Djuminah, 2017).

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kawasan kumuh di perkotaan. Program ini diluncurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai bagian dari upaya mencapai target "100-0-100" yaitu 100% akses air minum layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dasar dan lingkungan di kawasan kumuh perkotaan. Program ini juga bertujuan memberdayakan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, jangka waktu pelaksanaan program yaitu 90 hari kerja terhitung pada saat pengesahan RAB Program KOTAKU (Taqwa & Mashur, 2024).

Program KOTAKU ini pada dasarnya menjadi tugas besar Pemerintah Daerah selaku aktor utama dalam proses penanggulangan permukiman kumuh dan mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Tujuan dari program tersebut adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mensupport terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Peningkatan akses terhadap infrastruktur tersebut di tinjau pada kriteria kekumuhan yang menjadi dasar perhitungan pengurangan luas kumuh sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang mencakup bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran (Widodo & Riyadh, 2023).

Tujuan pelaksanaan perencanaan Program KOTAKU yaitu untuk menyeimbangkan akses-akses pelayanan dasar dan infrastruktur terhadap permukiman kumuh di perkotaan untuk menyelenggarakan terwujudnya sebuah cita-

cita permukiman perkotaan yang layak untuk dijadikan tempat tinggal, yang produktif dan juga berkelanjutan. Tujuan pelaksanaan perencanaan Program KOTAKU dapat terwujud dengan:

1. Semakin sempitnya permukiman yang kumuh
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) pada tingkat kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan mengenai perumahan dan permukiman yang kumuh berfungsi dengan tepat
3. Terbentuknya rancangan-rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang perumahan dan permukiman yang kumuh pada tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang tersusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Semakin berkembangnya jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan ketersediaan kegiatan dan infrastruktur peningkatan masyarakat untuk mendukung meningkatnya kualitas dan mutu kawasan permukiman yang kumuh.
5. Terimplementasikannya aturan-aturan secara kolektif sebagai bentuk upaya terhadap perubahan perilaku gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat.

1.10.3 Strategi dan Prinsip Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

1. Strategi Dasar

Kolaborasi seluruh pihak Pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh

2. Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
- b. Meningkatkan kapasitas dan mampu berkolaborasi dan mengembangkan kelembagaan yang membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Masyarakat.
- c. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
- d. Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya.

- e. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (*baseline*) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian.
- f. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota.
- g. Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- h. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci.
- i. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah;

- a. Pemerintah Daerah sebagai Pengarah nahkoda bersama dengan pemerintah kelurahan atau desa, memimpin upaya penanganan permukiman kumuh dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor-sektor terkait dan aktor-aktor di berbagai tingkat pemerintahan, serta turut melibatkan masyarakat dan kelompok yang peduli.
- b. Perencanaan yang Menyeluruh dan Berfokus pada Hasil (Outcome) Proses penataan permukiman dilaksanakan dengan pendekatan yang holistik dan berfokus pada pencapaian tujuan, yaitu menciptakan permukiman yang layak huni sesuai dengan visi kabupaten atau kota. Hal ini juga mendukung pencapaian target nasional, yaitu penyelesaian 0 hektar permukiman kumuh dalam lima tahun mendatang.
- c. Sinkronisasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Rencana penanganan permukiman kumuh disusun oleh Pemerintah Daerah dan mengacu pada visi kabupaten/kota yang tercantum dalam RPJMD. Rencana ini terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota, yang diselaraskan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana tersebut juga memperhatikan rencana yang ada di tingkat masyarakat dan mengintegrasikan anggaran mulai dari Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemerintah desa dan kecamatan.

d. Partisipatif

Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top down*) dan dari bawah (*bottom up*) sehingga perencanaan di Tingkat Masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro / tingkat kota.

e. Kreatif dan inovatif

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.

f. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.

g. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)

Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*).

h. Investasi penanganan permukiman kumuh

Selain harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.

i. Revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat

Penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

1.10.4 Tahapan Penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Untuk mewujudkan tujuan program, berikut tahapan pelaksanaan di tingkat kelurahan/desa yang menjadi satu kesatuan dengan tahapan Tingkat kabupaten/kota, yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap keberlanjutan. Tahapan tersebut dapat berulang secara dalam kurun waktu tertentu mengikuti tahapan kegiatan perencanaan pembangunan reguler.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan kelurahan/desa dalam penyelenggaraan kolaborasi; dan penggalangan relawan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman.

Tahap persiapan meliputi dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk lokakarya orientasi tingkat desa/kelurahan dan pembentukan/penguatan TIPP. Tahapan sosialisasi awal Program KOTAKU dilakukan melalui berbagai kegiatan, berbagai media dan dilakukan dari tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa hingga ke tingkat lingkungan dengan target sebanyak mungkin warga kota tahu dan memahami Program KOTAKU. Tahapan yang kedua adalah dengan membentuk TIPP yang merupakan Tim Perencanaan Partisipatif Penataan Lingkungan. Permukiman tingkat kelurahan/desa yang didalamnya terdiri dari beberapa Pokja yang minimal sesuai dengan 7 indikator kumuh atau lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai bahan sosialisasi, pemerintah kecamatan/kelurahan/desa memulai dengan mempersiapkan:

- a. Pemetaan pelaku yang sekiranya terkait dengan isu kekumuhan di kecamatan maupun di kelurahan/desa. Pelaku tersebut akan berperan sebagai agen sosialisasi dan tim inti perencanaan partisipatif;
- b. Pemahaman awal mengenai kondisi atau tingkat kekumuhan di tingkat kecamatan/kelurahan/desa;
- c. Kajian awal terhadap berbagai instansi dan program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk kebijakan dalam RPJMD Desa, yang terkait dengan Program KOTAKU.

2. Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan dimulai dengan tahapan merumuskan kondisi permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang yang dituangkan kedalam visi dan misi pembangunan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan refleksi perkara kritis tentang masalah perikehidupan dan penghidupan (livelihood), lingkungan permukiman yang kumuh, kemiskinan, kesehatan, bencana juga difabilitas. Untuk melihat kondisi apa yang direfleksikan oleh masyarakat dalam FGD perkara kritis, TIPP melakukan Pemetaan Swadaya untuk memetakan kondisi-kondisi dengan basis data baseline 100-0-100 yang kemudian dipertajam kedalam masing-masing aspek termasuk masalah livelihood, kebencanaan, gender dan penafisan terhadap dampak lingkungan dan sosial. Dari hasil kajian Pemetaan Swadaya TIPP Bersama tim pendamping menuangkan kedalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau perencanaan yang setara. Dokumen RPLP ini merupakan rencana makro kelurahan/desa yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terintegrasi antar kelurahan/desa yang berbatasan maupun dengan rencana tingkat kotanya.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur yang telah disusun dalam dokumen RPLP. Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat berasal dari beberapa sumber diantaranya APBN/bantuan investasi, APBD kabupaten/kota, APB Desa, swasta, swadaya, dan lain-lain. Pelaksanaan tingkat kelurahan/desa meliputi kegiatan infrastruktur, ekonomi, dan sosial, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan infrastruktur skala lingkungan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur harus berkualitas sesuai dengan standar teknis dan berfungsi dengan baik. Secara lebih rinci diuraikan dalam POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan;
- b. Kegiatan ekonomi terdiri dari peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dimaksud di atas secara jelas telah diatur

secara rinci dalam POS Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK);

- c. Kegiatan sosial, antara lain pengembangan kapasitas ditingkat Kelurahan/Desa dapat terdiri dari kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya: pelatihan/on the job training kepada LKM/BKM, UP-UP, pemerintahan kelurahan/desa, relawan, TIPP, KSM/Panitia, dan Masyarakat, sosialisasi menerus dan Pelatihan on the job training vocational; pengembangan media warga dan media sosial untuk kepentingan masyarakat; pelaksanaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat; kegiatan pemasaran program permukiman dan; Kegiatan sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan program dan visi permukiman.

4. Tahap Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan merupakan tahapan yang secara menerus dilakukan oleh masyarakat, dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kegiatan keberlanjutan meliputi:

- a. Pengembangan kelembagaan dan pembangunan kolaborasi secara menerus;
- b. Integrasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

1.10.5 Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan didalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat (Kusuma dkk., 2018).

Berdasarkan pada pemahaman Serry R Arnsterin dalam jurnal The American Institute of Planners, Nomor 35 Bulan Juli dengan judul A Ladder Of Citizen's Participation, membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkatan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan pada kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat, dari tingkat partisipasi tertinggi hingga tingkat partisipasi terendah yaitu: Manipulation, Therapy, Informing, Consultation, Placation, Partnership, Delegated Power, Citizen Control (Setiawan dkk, 2020).

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers mengemukakan tiga

alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa mempunyai sifat yang sangat penting (Kaehe dkk, 2019).

1. Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi Masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program Pembangunan serta proyek akan gagal.
2. Pembangunan akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut.
3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila Masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

1.11 Penelitian Terdahulu

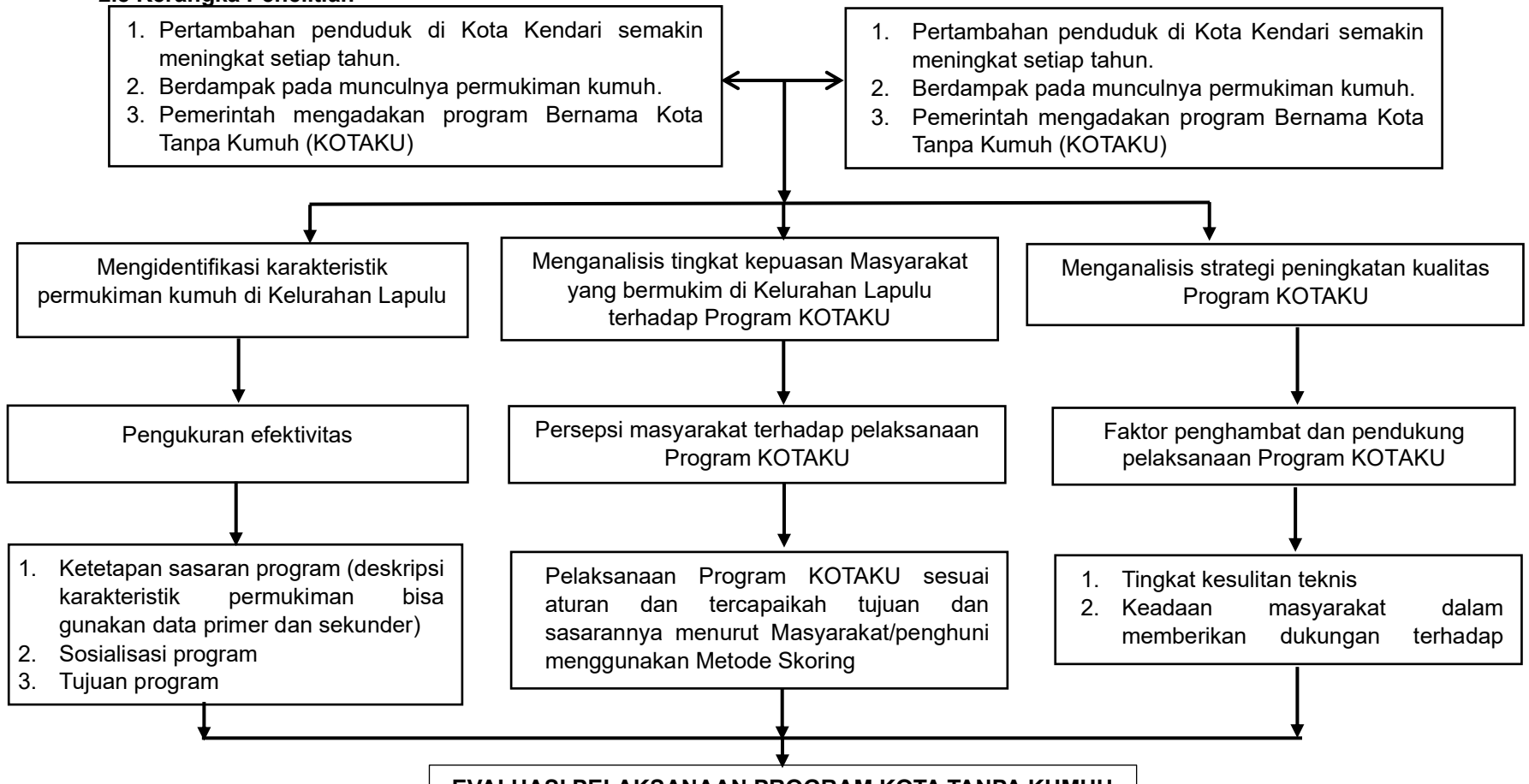
Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk menunjang penelitian, baik dari segi tema maupun metode yang digunakan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang telah dikaji oleh penulis dan dijabarkan pada Tabel 2 berikut

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Teknik Analisis	Perbedaan dan Persamaan	Hasil	Sumber
1.	Laras seketi, Ngalimun, Denok Kurniasih	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh <i>idealized policy, target group, implementing organization dan environmental factor</i> terhadap keberhasilan implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Purbalingga Kidul	Metode kuantitatif asosiatif	Perbedaan: variabel penelitian dan teknik analisis Persamaan: mengidentifikasi keberhasilan implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU)	Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Purbalingga Kidul dapat dilakukan dengan memperbaiki <i>idealized policy, target group, implementing organization dan environmental factor</i> .	Jurnal wilayah dan kota Vol 06 No 02, https://www.researchgate.net/publication/346199406_Implementasi_Program_Kota_Tanpa_Kumuh_KOTAKU_Di_Kelurahan_Purbalingga_Kecamatan_Purbalingga_Kabupaten_Purbalingga
2.	Candra Muhammad Aprianca & Sadar Yuni Raharjo	Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Rw 05 Mekarjaya, Kelu- rahan Sukamiskin, Kota Bandung	Untuk mengetahui kepuasan atau respon masyarakat terhadap Program KOTAKU di Rw 05 Mekarjaya	Metode deskriptif kualitatif	Perbedaan: variabel penelitian dan teknik analisis Persamaan: mengidentifikasi keberhasilan Program KOTAKU	Penelitian ini menunjukkan keberhasilan capaian Program KOTAKU, Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Program KOTAKU & Dampak Program KOTAKU	FTSP Series : Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir 2022, https://e-proceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article

							/download/1422/1261/1386
3.	Annisa Fitri & Herlina Sakawati	Implemnetasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kecamatan Tanete Riattang Bone	Untuk mengetahui bagaimana implmentasi Pogram KOTAKU di Kecamatan Tanete Riattang dan untuk mengetahui	metode kualitatif dekriptif	Perbedaan: variabel penelitian dan teknik analais Persamaan: mengidentifikasi keberhasilan Program KOTAKU	Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dinilai sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan teori Meriee S. Grindle dan juga faktor pendukung pada implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yaitu partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan lahan, pola piker masyarakat, sebagian anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kurang aktif.	Jurnal Aktor Vol. 1, No. 1, Oktober 2021 p-ISSN: 2808-4365, e-ISSN: 2808-5167, https://ojs.unm.ac.id/Aktor/article/download/24332/12266

2.8 Kerangka Penelitian



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi, tabel, gambar dan peta. Sementara itu, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait kondisi eksisting lingkungan permukiman di Kelurahan Lapulu.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian evaluasi (Evaluative Research). Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah evaluasi sumatif. Menurut Scriven, 1997 dalam Pratiwi (2020) evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir program untuk memberi informasi tentang tentang manfaat dan kegunaan program. Metode Penelitian yang digunakan dalam melakukan evaluasi adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Menurut Nawawi, 1990 dalam Pratiwi (2020), metode deksriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian atau masalah-masalah yang diteliti diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat. Pada metode deskriptif peneliti menyajikan data-data penelitian dan menganalisis temuan-temuan yang ada serta memberikan tinjauan kritis.

Penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan tentang hasil dari Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lapulu berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, dan mencoba untuk menilai Tingkat keberhasilan program berdasarkan data yang diperoleh.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan yang dimulai pada bulan Desember 2022 hingga 2024. Lokasi penelitian berada di permukiman kumuh di kelurahan tapulu Kecamatan Abeli.

2.3 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari melalui observasi dan penyebaran kuesioner. Adapun data primer yang dibutuhkan yaitu:

- a. Dokumentasi kondisi eksisting Permukiman di Kelurahan Lapulu
- b. Batas wilayah Permukiman kumuh di Kelurahan Lapulu
- c. Aspek Fisik lokasi hunian, dan keamanan serta kenyamanan lingkungan
- d. Identifikasi prasarana dan sarana Permukiman di Kelurahan Lapulu seperti jaringan jalan, jaringan air limbah, jaringan drainase, persampahan, air bersih, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan ruang terbuka hijau. Sedangkan, data yang diperlukan untuk aspek tidak langsung yaitu aspek non fisik. Dalam penelitian ini aspek non fisik yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:
Standar Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Masyarakat

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari artikel-artikel, jurnal, instansi atau pihak lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data sekunder yang dibutuhkan adalah.

- a. Data demografi;
- b. Citra lokasi penelitian;
- c. Peta dasar lokasi penelitian; dan
- d. Pedoman/peraturan mengenai permukiman dan aturan sarana dan prasarana, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Undang-undang terkait.
- e. BPS Kota Kendari

2.4 Populasi dan Sampel

Populasi bukan tentang orang, objek, bahkan jumlah yang ada pada suatu yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Contoh, kita melakukan penelitian di wilayah A yang merupakan populasi.

Wilayah A mempunyai sejumlah orang/subjek dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah kuantitas dan wilayah A juga mempunyai karakteristik orang-orangnya, misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasinya, dll. dan juga mempunyai karakteristik objek yang lain, misalnya kebijakan, prosedur kerja, lulusan yang dihasilkan dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan populasi dalam arti karakteristik wilayah A (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat yang terdampak Program KOTAKU di Kelurahan Lapulu, yakni RW 2. Adapun RT yang terdapat pada RW 2 adalah 2 RT dengan jumlah rumah 154 rumah.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh unit rumah sebanyak 154 bangunan yang akan diwakili oleh responden yaitu 1 rumah diwakili oleh 1 orang anggota keluarga sebagai responden. Adapun Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan Teknik probability sampling. Teknik probability sampling merupakan Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan dalam pengumpulan data untuk mendukung penelitian mencakup penggunaan berbagai teknik. Untuk data sekunder dalam penelitian ini, teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi literatur, pengambilan data citra satelit melalui sasplanet, dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS). Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei lapangan yang melibatkan observasi, kuesioner dan wawancara yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting permukiman kumuh di Kelurahan Lapulu.

2. Wawancara

Pihak yang dijadikan informan dalam wawancara yaitu Masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh di Kelurahan Lapulu

3. Studi Literatur

Studi literatur merupakan pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk objek penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengambil data lapangan namun, disajikan dalam bentuk gambar. Data ini berfungsi sebagai data pendukung hasil observasi yang telah dilakukan.

5. Kuisisioner

Kuesioner penelitian merupakan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden penerima Program KOTAKU.

2.6 Teknik Analisis

2.6.1 Tujuan Penelitian Pertama

Tujuan penelitian pertama untuk mengidentifikasi tingkat efektifitas program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis spasial. Berikut ini penjabaran masing-masing analisis yang digunakan:

1. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan dan gambaran terkait karakteristik permukiman agar dapat mengetahui ketepatan sasaran program melalui wawancara dan obeservasi pada lokasi penelitian berupa pengamatan karakteristik lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana dasar dan kondisi sosial masyarakat.
2. Analisis *spasial* digunakan untuk memberi ilustrasi berupa peta terhadap data hasil penelitian yang dilengkapi dengan *photo mapping* dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam analisis ini yaitu ArcGis versi 10.8.

2.6.2 Tujuan Penelitian Kedua

Tujuan penelitian kedua untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menggunakan kuisisioner. Sampel responden yang diambil terdiri dari 154 KK . Setiap pertanyaan dalam kuesioner diberi skor menggunakan skala Guttman. Menurut Sugiyono dalam Mahendra dan Nugroho (2018), Skala Guttman adalah metode pengukuran yang

digunakan untuk menilai sejauh mana responden setuju atau tidak setuju dengan pernyataan, biasanya dengan opsi 'setuju' atau 'tidak setuju', 'ya' atau 'tidak', atau 'benar' atau 'salah'. Metode ini tidak menggunakan nilai numerik atau skala Likert dengan lebih dari dua opsi. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai persepsi Masyarakat terhadap pelaksanaan Program KOTAKU di permukiman kumuh Kelurahan Lapulu. Berikut tabel penialain skor,Skala *Gutman*

Tabel 3 Skor penelitian kriteria Program KOTAKU

Jawaban	Bobot
Efektif	2
Tidak Efektif	1

Sumber: Suguyino dalam Mahendra dan Nugrho (2018)

Selanjutnya, skor yang diperoleh dari kuisisioner kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan Relative Important Index (RII) melalui rumus 1

$$RII = \frac{\sum_{i=1}^{i=2} n \cdot x_i}{A \times N}$$

Keterangan:

i = Skala nilai (1 dan 2)

A = Skala nilai terbesar (2)

n1 = Jumlah responden yang memberikan skala nilai 1

N = Total responden

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh indeks Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap program Kota Tanpa Kumuh. Rentang nilai RII yang dihasilkan adalah antara 0 dan 1.

Tabel 4 Kriteria efektifitas

Interval	Kriteria
0,00 – 0,50	Tidak Efektif
0,51 – 1,0	Efektif

Sumber: Sugiyono dalam Mahendra dan Nugroho (2018)

3.6.3 Tujuan Penelitian Ketiga

Tujuan penelitian ketiga untuk menentukan strategi peningkatan kualitas program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menggunakan analisis SWOT yaitu mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan (*Opportunities*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). (Rangkuti, 2014) dalam (Dewi dkk, 2022). Analisis SWOT yang mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan melalui IFAS (Matriks Internal

Strategic Factors Analysis Summary)), serta peluang, dan ancaman melalui EFAS (Matriks Eksternal Strategic Factors Analysis Summary), merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Penggunaan IFAS dan EFAS diharapkan dapat membantu identifikasi faktor secara sistematis. Dalam melakukan pembobotan, rating, dan skor, diperlukan penggunaan matriks IFAS dan EFAS. (Rangkuti, 2013) dalam (Susilowati, 2023) Analisis dimulai dengan menentukan bobot, rating dan skor untuk tiap faktor yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Melakukan pengolahan data kuisisioner yang diperoleh dari jumlah responden yang memberikan skala penilaian pada setiap pertanyaan yang disajikan.
2. Beri masing-masing bobot pada skala mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting) dan jika dijumlahkan total bobot bernilai 1,00. Untuk perhitungan bobot diperoleh dari total penilaian responden dibagi dengan total faktor perhitungan IFAS.
3. Hitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 sampai dengan 1. Pemberian nilai rating untuk faktor kekuatan bersifat positif (kekuatan semakin besar diberikan 4, tetapi jika kekuatannya kecil diberikan rating 1). Pemberian nilai kelemahan kebalikannya. Misalnya, jika nilai kelemahan sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya jika nilai kelemahan sedikit, ratingnya 4. Untuk perhitungan rating diperoleh dari total penilaian responden dibagi dengan jumlah responden.
4. Menentukan nilai skor dengan mengalihkan bobot dan rating. Sedangkan EFAS disusun dengan cara menyusun IFAS akan tetapi kekuatan diganti dengan peluang, sedangkan kelemahan diganti dengan ancaman.

Setelah hasil penghitungan skor tersebut diperoleh, maka dapat ditentukan koordinat sumbu X dan Y untuk menentukan kuadran jika. Koordinat X diperoleh melalui faktor internal dimana nilai kekuatan dikurangi dengan nilai kelemahan. Koordinat Y diperoleh berdasarkan faktor eksternal yaitu nilai peluang dikurangi nilai ancaman. Setelah itu, dilakukan analisis matriks SWOT yang akan memperoleh empat kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Tabel SWOT

IFAS	<u>Strengths (S)</u>	<u>Weakness (W)</u>
EFAS	Daftar semua kekuatan yang dimiliki	Daftar semua kelemahan yang dimiliki

<u>Opportunities (O)</u>	<u>STRATEGI SO</u>	<u>STRATEGI WO</u>
Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi	Strategi yang menggunakan kekuatan peluang	Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<u>Thereats (T)</u>	<u>STRATEGI ST</u>	<u>STRATEGI WT</u>
Daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari kelemahan dan menghindari ancaman

Tabel 5 menunjukkan penjelasan untuk masing-masing strategi pada matriks SWOT menurut Ranguti (2004) adalah sebagai berikut:

- Strategi SO (Strenght-Opportunity) Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- Strategi ST (Strenght-Threath) Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada.
- Strategi WO (Weakness-Oppurtunity) Strategi ini berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi WT (Weakness-Threath) Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman.

2.7 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Tabel 6 Variabel penelitian

No.	Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator	Kebutuhan Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Output
1.	Mengidentifikasi karakteristik permukiman Kumuh pada Kel. Lapulu Kec. Abeli	Aspek Fisik	1. Kondisi bangunan 2. Kondisi jalan 3. Kondisi drainase 4. Kondisi penyediaan air minum 5. Kondisi pengelolaan air limbah 6. Kondisi persampahan 7. Kondisi proteksi kebakaran	1. Ketidakteraturan bangunan 2. Tingkat kepadatan bangunan 3. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat 4. Jalan lingkungan tidak melayani permukiman 5. Kualitas permukaan jalan 6. Ketidaktersediaan drainase 7. Ketidakmampuan mengalir limpasan air hujan 8. Kualitas konstruksi drainase 9. Ketidaktersediaan akses air minum 10. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 11. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Data Primer	Observasi, Dokumentasi, Wawancara	Deskriptif Kualitatif	Mengetahui karakteristk permukiman kumuh di Kelurahan Lapulu

No.	Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator	Kebutuhan Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Output
				11. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis 12. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai persyaratan teknis 13. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.				
		Aspek Non Fisik	1. Kondisi ekonomi masyarakat 2. Kondisi sosial masyarakat	1. Jenis Pekerjaan 2. Tingkat pendapatan masyarakat 3. Tingkat pendidikan masyarakat 4. Sosial budaya masyarakat				
2.	Mengetahui persepsi masyarakat terhadap Program KOTAKU pada permukiman kumuh		1. Tahap persiapan 2. Tahap Perencanaan 3. 3.Tahap Pelaksanaan 4. Tahap Keberlanjutan	Keterlibatan masyarakat yang dilakukan pada setiap tahapan progam KOTAKU	Data Primer	Wawancara, Kuesioner	Deskriptif Kualitatif Kuantitatif	Mengetahui penilaian masyarakat terhadap Program KOTAKU dalam penanganan permukiman

No.	Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator	Kebutuhan Data	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Output
								kumuh di Kelurahan Lapulu
3.	Merumuskan Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh		1. Karakteristik permukiman kumuh 2. Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Program KOTAKU pada permukiman	1. Kondisi eksisting permukiman kumuh 2. Kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Program KOTAKU pada permukiman kumuh	Data Primer, Sekunder	Observasi, Wawancara	SWOT	Adanya strategi pelaksanaan Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lapulu

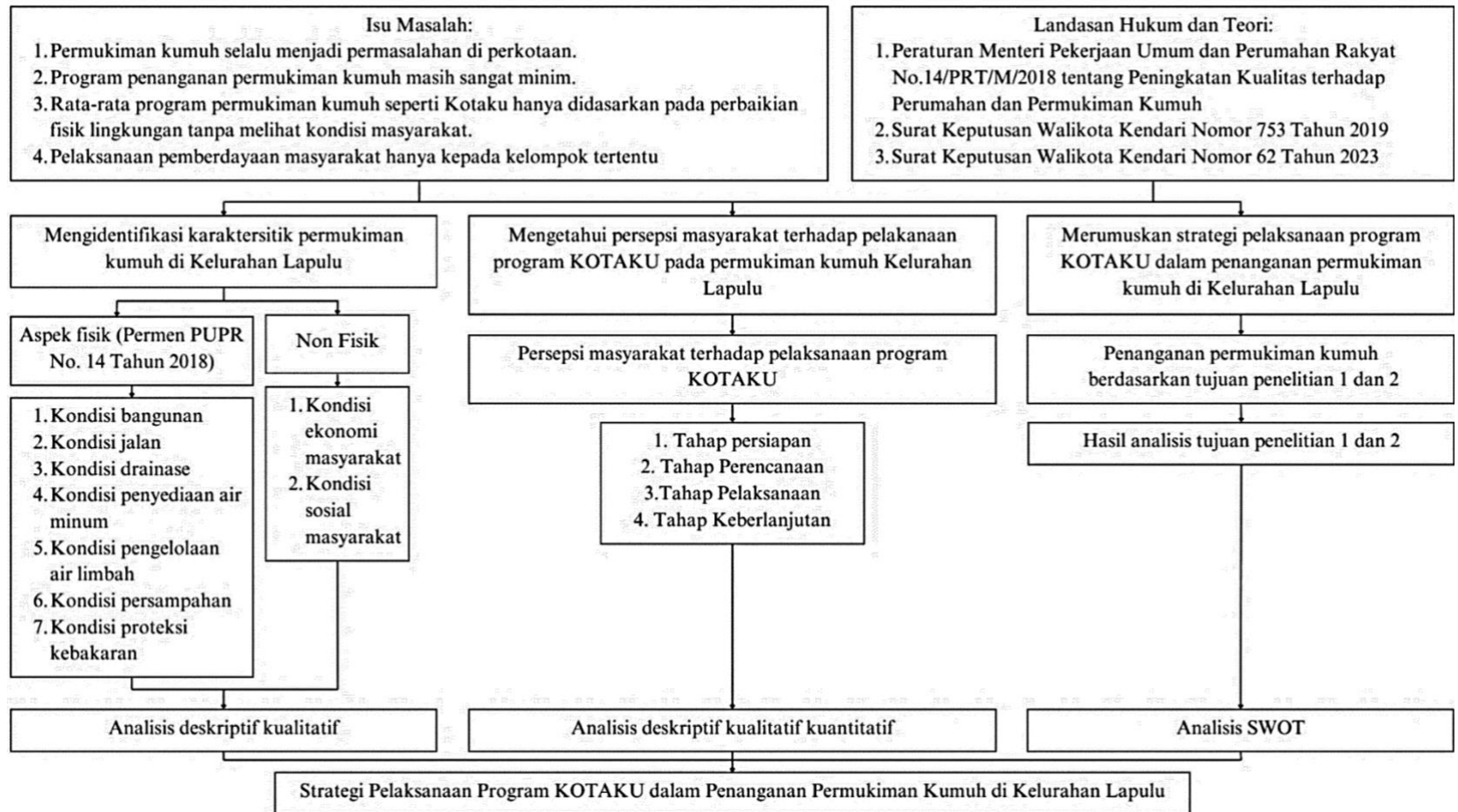
Sumber: Penulis, 2024

2.8 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. **Permukiman kumuh** dinilai dari permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
2. **Karakteristik permukiman kumuh** diukur berdasarkan karakteristik fisik dan non fisik pada kawasan kumuh.
3. **Karakteristik fisik permukiman kumuh** diukur berdasarkan kriteria permukiman kumuh yaitu kondisi bangunan, kondisi jaringan jalan, kondisi drainase, pengelolaan air limbah, kondisi air bersih, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.
4. **Kondisi bangunan** diukur berdasarkan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan kualitas bangunan.
5. Kondisi jaringan jalan diukur berdasarkan kualitas permukaan jalan dan keterjangkauan jaringan jalan.
6. **Kondisi drainase** diukur berdasarkan ketidaktersediaan drainase, ketidakmampuan mengalir limpasan air hujan, dan kualitas konstruksi drainase.
7. **Pengelolaan air limbah** diukur berdasarkan ketersediaan fasilitas pembuangan air limbah dan ketersediaan septictank pada setiap hunian.
8. **Kondisi air bersih** diukur berdasarkan kualitas dan ketersediaan sumber air bersih.
9. **Pengelolaan persampahan** diukur berdasarkan ketersediaan bak sampah dan moda pengangkutan sampah.
10. **Proteksi kebakaran** diukur berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran
11. **Karakteristik non fisik permukiman kumuh** diukur berdasarkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya.
12. **Kondisi ekonomi** diukur berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat.
13. **Kondisi sosial dan budaya** diukur berdasarkan tingkatan pendidikan dan tradisi masyarakat.

14. **Tahapan Program KOTAKU** diukur berdasarkan persepsi masyarakat terhadap tahapan pelaksanaan Program KOTAKU diantaranya persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan Program KOTAKU
15. **Strategi pelaksanaan Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh** diukur berdasarkan hasil analisis tujuan penelitian pertama dan kedua, yaitu karakteristik permukiman kumuh dan kajian persepsi masyarakat terhadap tahapan pelaksanaan Program KOTAKU.



Gambar 2 Kerangka penelitian

